



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)
- Foulkes dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 (sesuai urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, (Jakarta; sekretaris jendral MPR RI 2010
- Mubyarto, *Peluang Kerja Dan Berusaha Di Pedesaan*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 1993, Hlm:25-26.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2007, *Dualisme Penulisan Hukum*, Yogyakarta. Cetakan 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Septi Nur Wijayanti dkk, *Hukum Administrasi Negara dan Prateknnya Di Indonesia* (Yogyakarta; fakultas hukum UMY & devisi publikasi penerbitan LP3M UMY 2009)
- Tahir Azhary dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Soehini, *Ilmu Negara*, Liberti, Yogyakarta 1998
- Han Wijaya, 2001, Pemerintahan Desa Marga berdasarkan Undang-undang nonoe 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah Suatu telaah Administrasi Negara*, Radja Grafindo Persada Jakarta
- B.N Marbun, 1996. *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Yosep Riwokohu, 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, jakarta
- Widarta, 2001, *Pokok-pokok Pemerintahan daerah*, Lampera Pustaka Utama, Yogyakarta
- Suhartono, 2000. *Politik Desa Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*, Lampera Pustaka Utama, Yogyakarta

Bagir Manan, 2001. *Menyongsong fajar Otonomi Daerah*, Pusat Study Hukum (PSH) UII, Yogyakarta.

Rozali Abdul, 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Radja Grafindo Persada, Jakarta

M.Ryaas Rasyid, dkk, 2002. *Otonomi daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar* Yogyakarta

*Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, Kamus besar bahasa Indonesia, Edisi II, (Jakarta:Balai Pustaka , 1994),

W.J.S. Poerwodarminta 1982,

## **B. Jurnal**

Agus Kusnadi.(2015).Perkembangan Polik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2.564-580

Ahmad Fandoli.(2016).Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 tahun 2015 Tentang pedoman Pemilihan Kepala Desa Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015.Pta Trunojoyo.1-10

Alia Harumdani Widjaja.(2017).Implikasi KonstitusionalitasPengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa.*Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, 351-372

Andi Pitono,Kartiwi.(2016).Penguatan pemerintahan desa dan kelurahan menuju pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat..*JURNAL POLITIKOLOGI volume 3 .27-37*

Indra Muchlis Adnan, Wandu.(2017).Studi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.*Ejournal unisi.78-94*

Kushandajani.(2015).Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. *Yustisia. Volume 4.369-396*

Miftakhul Khayri Kusuma.(2014). Negaranisasi Desa:Studi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pacul Dan Desa Kasiman Kabupaten Bojonegoro Pasca Otonomi Daerah,*JPMAD*,1-11

Munif,R.(2015).Sekretaris desa dalam pemerintahan desa, *Jurnal Independent Volume 2* , 45-52

Rose Siti Badriah.(2017). Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis,482-488

Suhana.(2014). Pelaksanaan pemrintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan,*E jurnal Suhana*,1-15

Youla C. Sajangbati.(2015)Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.*Lex Administratum*.Vol. III.24-33

### **C. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabuaten Kulon Progo Nomer 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa